

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Proses perubahan sosial suatu bangsa antara lain sangat bergantung kepada pendidikan. Peranan pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur atau tidak terstruktur akan menentukan perkembangan kapasitas intelektual bangsa yang bersangkutan. Secara kolektif serta seiring dengan kebudayaan setempat, kondisi ini memungkinkan pengembangan peradaban ke arah kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih menguntungkan.

Sistem pendidikan suatu bangsa merupakan refleksi dari kelebihan dan kekurangan budaya masyarakat itu sendiri yang di dalamnya mengandung falsafah, nilai-nilai, politik, adat-istiadat dan kebiasaan yang turut mewarnai kehidupan individu dalam peranan kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Tilaar (1990 : 30) mengungkapkan “Pendidikan harus dilihat sebagai salah satu kekuatan sosial yang ikut membentuk corak dan arah pada kehidupan masyarakat masa depan”. Itulah sebabnya pendidikan telah dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang konstitusional. Atas dasar itu, maka sistem pendidikan nasional juga mengandung hak asasi yang konstitusional. Misalnya Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 menegaskan:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran;
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Secara teknis operasional amanat konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut antara lain menegaskan : “Pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah”. Jalur pendidikan sekolah adalah “pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan”, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah mencakup “pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat”.

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, khususnya jalur pendidikan luar sekolah menuntut pendayagunaan seluruh potensi masyarakat. Peranan masyarakat sebagai subyek dan obyek pendidikan sangat menentukan terwujudnya tujuan pendidikan yang ideal. Seperti halnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tadi yang mengamanatkan : “penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah”. Oleh karena itu untuk mengatur tanggung jawab dimaksud, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Pasal 2 dari PP tersebut menegaskan bahwa : “Peranserta masyarakat berfungsi ikut

memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional”. Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan : “peranserta masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, secara nyata memerlukan peran serta masyarakat secara luas. Demikian pula halnya dengan pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan oleh institusi tertentu, juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Tetapi partisipasi aktif itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa ada upaya-upaya sistematis dari instansi dimaksud. Dalam hal ini diperlukan suatu manajemen atau administrasi pendidikan yang selaras dengan tugas dan fungsi institusi yang bersangkutan.

Administrasi pendidikan merupakan penerapan dari administrasi secara umum. Administrasi pendidikan sering diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses administrasi pendidikan antara lain memerlukan pendekatan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep administrasi terpadu adalah suatu pendekatan yang berlandaskan kepada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi kepada depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi. Pendekatan terpadu melibatkan berbagai dimensi serta mengoptimalkan fungsi koordinasi dan dalam pelaksanaannya

sangat tepat dengan konsep *management participation*, konsep ini mempunyai dimensi konteks, tujuan dan lingkungan. Hal itu dapat dikembangkan menjadi suatu proses yang melibatkan berbagai pihak.

John M. Cohen dan Norman T. Uphoff (1977 : 6 – 8) mengungkapkan bahwa kerangka kerja mempunyai tiga dimensi yaitu :

Context of participation may affect its extent and substance; to understand this context, we suggest analysis of the nature of the development task at hand and the most salient features of the environment in projects are undertaken.

Kerangka kerja ini menunjukkan bagaimana suatu pengembangan program melalui pendekatan pengembangan partisipasi. Gambaran adanya partisipasi dari instrumental yang ada seperti konstitusi, keterlibatan masyarakat, kelompok atau personal adalah tergantung kepada sampai sejauhmana keterlibatan itu dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, manfaat adanya partisipasi, dan keterlibatan dalam evaluasi.

Dengan demikian munculnya partisipasi dimungkinkan oleh ketersediaan instrumen yang menghubungkan institusi dengan masyarakat sebagai obyek pendidikan. Dalam hubungan ini Jerome Bruner (dalam Nasution, 1992 : 15) membagi alat instruksional pendidikan dalam 4 macam menurut fungsinya :

1. Alat untuk menyampaikan pengalaman *vicarious*, yaitu menyajikan bahan kepada murid-murid yang sedianya tidak dapat mereka peroleh dengan pengalaman langsung yang lazim di sekolah. Ini dapat dilakukan melalui film, TV, rekaman suara, dan lain-lain. *Vicarious* berarti substitusi atau pengganti pengalaman yang langsung.

2. Alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala, misalnya model molekul atau alat pernafasan, tetapi juga eksperimen atau demonstrasi, juga program yang memberikan langkah-langkah untuk memahami suatu prinsip atau struktur pokok.
3. Alat dramatisasi, yakni yang mendramatisasikan sejarah suatu peristiwa atau tokoh, film tentang alam yang memperlihatkan perjuangan untuk hidup, untuk memberi pengertian tentang suatu ide atau gejala.
4. Alat otomatisasi seperti *teaching machine* atau pelajaran berprograma yang menyajikan suatu masalah dalam urutan yang teratur dan memberi balikan atau *feedback* tentang respons murid. Alat ini dapat meringankan beban, guru tidak akan dapat menggantikannya seperti halnya dengan buku. Selain itu alat ini segera memberikan *feedback* dan memberi jalan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh murid.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa salah satu instrumen untuk mewujudkan partisipasi masyarakat adalah informasi melalui media massa dan non-massa. Informasi dengan demikian merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan luar sekolah yang efektif. Itu pula sebabnya pengelolaan informasi memerlukan perhatian khusus agar pesan-pesan yang disampaikan dan merupakan "pelajaran" bagi masyarakat bisa diterima secara efektif pula.

Demikian pula halnya dengan pendidikan kesehatan, khususnya tentang imunisasi polio kepada masyarakat. Pada dasarnya memerlukan media informasi yang perlu dikelola secara profesional, sehingga materi yang disampaikan dapat dikemas sesuai dengan khalayak penerima. Sebagai media pendidikan, informasi dapat dipancarkan melalui media massa, sehingga secara

efektif akan lebih mudah diterima masyarakat luas. Informasi ini dinilai sangat penting untuk mengubah perilaku ibu/pasangan suami istri dari tidak tahu menjadi tahu pentingnya imunisasi bagi anak balita.

Suyudi (1955) mengemukakan : “Meskipun hasil-hasil pembangunan secara nyata telah dinikmati oleh segenap masyarakat, namun pembangunan kesehatan di Indonesia dewasa ini menghadapi transisi epidemiologis, terutama sebagai akibat dari adanya pergeseran demografis industrialisasi dan urbanisasi”. Suyudi juga menyatakan “Upaya pencegahan penyakit menular terutama yang dapat dicegah dengan imunisasi telah dapat ditingkatkan dengan hasil yang memuaskan. Cakupan imunisasi bayi lengkap untuk penyakit-penyakit TBC, difteri, batuk rejan, tetanus, polio, dan campak telah mencapai 90 persen”.

Khusus mengenai penyakit polio, pemerintah mencanangkan bahwa pada tahun 2000 Indonesia akan bebas dari penyakit ini. Untuk itu pemerintah melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio (PIN). Pelaksanaan PIN merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas secara tuntas polio di Indonesia. Pemberantasan polio ini juga merupakan komitmen Indonesia terhadap upaya Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization* = WHO) untuk menghapus penyakit polio dari muka bumi sampai tahun 2000.

Menurut Benny Kaligus (1995), polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio genus Enterovirus dan mengakibatkan kelumpuhan terutama

pada bayi atau anak yang belum mendapat imunisasi. Sebelum perang dunia II, penyakit ini di Indonesia masih merupakan penyakit yang sporadis endemis. Epidemik baru muncul kemudian pada tahun 1984 di Belitong yang disusul berturut-turut dengan epidemik di beberapa kota seperti Bandaneira (1951), Balikpapan (1951), Bandung (1951), Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tuban (1952), Semarang (1954), Yogyakarta dan sekitarnya (1954 dan 1955), Palu (1956), Medan (1957), dan Bangka (1958).

Kasus epidemik terakhir muncul di Bali Selatan (1976/1977) dengan 71 kasus orang dirawat dan *attack rate* (tingkat serangan) mencapai 90 tiap 100.000 pada umur 0 – 4 tahun. Pada waktu itu *incidence rate polio paralysis* (serangan yang menimbulkan kelumpuhan) berkisar antara 3,5 – 8,0 kasus tiap 100.000 penduduk dengan paralysis antara 3,7 – 13,6 tiap 10.000 di antara anak-anak sekolah antara umur 6 – 14 tahun.

Menurut Suyudi kasus yang dilaporkan hanya 15 orang. Jumlah ini merupakan persentase yang membanggakan karena sebelum tahun 1988 dalam kasus yang sama mencapai 800 orang. Namun dilihat dari jumlah orang yang mengidap polio dan secara potensial bisa menularkan kepada orang lain, hingga saat ini masih cukup tinggi. Tingginya potensi penyakit polio di Indonesia inilah yang menuntut pemerintah mengambil langkah – langkah antisipasi, salah satu langkahnya ialah dengan pencanangan “Tahun 2000 Indonesia Bebas Polio” lewat program PIN.

Program-program pembangunan, khususnya pembangunan kesehatan atau lebih khusus lagi pemberantasan penyakit polio melalui program PIN merupakan informasi atau pesan-pesan pembangunan yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat/ibu-ibu agar mereka dapat mengetahui dan tersentuh oleh informasi tersebut yang pada gilirannya akan mengimunitasikan anak balitanya.

Kebijaksanaan pokok komunikasi pembangunan antara lain diarahkan untuk meningkatkan pemerataan informasi sampai di desa-desa melalui berbagai media atau sumber. Untuk itu luas jaringan dan kemampuan sumber informasi seperti radio, televisi, film, pers, media massa tradisional, kantor berita perlu ditingkatkan. Dengan memperoleh informasi yang tepat, masyarakat dapat membantu memecahkan masalah pembangunan. Oleh karena itu agar informasi dapat sampai secara proporsional perlu suatu manajemen informasi yang optimal.

Melalui penyebaran informasi yang tepat khususnya program PIN kepada masyarakat sampai ke seluruh pelosok pedesaan baik melalui dokter, bidan dan media massa maupun melalui para pemuka masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang PIN. Sebagai bagian dari media pendidikan, peranan media massa dan tokoh-tokoh masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Pancaran informasi yang disampaikannya begitu luas, sehingga mampu mencapai pelosok-pelosok

terpencil. Ini berarti proses pendidikan tidak hanya melalui sekolah formal saja, tetapi banyak cara untuk memperoleh pendidikan.

Khusus di Kota Bandung pelaksanaan PIN cukup baik. Jumlah anak balita di Kota Bandung yang diproyeksikan menjadi sasaran target imunisasi, hasilnya ternyata mencapai 228.774 balita atau mencapai 106,79 %. Meskipun keberhasilan pelaksanaan PIN di Kota Bandung yang ditampilkan oleh angka-angka tadi cukup menggembirakan, namun belum diketahui apakah keberhasilan itu karena pengaruh manajemen informasi atau karena faktor lain. Kalau memang ada pengaruh antara manajemen informasi dengan partisipasi para ibu, maka sampai sejauhmana pengaruhnya? Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah fungsi manajemen informasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program imunisasi anak balita di Kota Bandung?
2. Apakah program imunisasi berpengaruh terhadap perubahan perilaku ibu, dalam hal ini para orang tua/pasangan suami istri yang mempunyai balita sehingga mereka mendatangi Pos PIN untuk mengimunitasikan balitanya?

3. Apakah implementasi program imunisasi berpengaruh terhadap perubahan perilaku ibu, dalam hal ini para orang tua / pasangan suami istri yang mempunyai balita sehingga mereka mendatangi Pos PIN untuk mengimunisasikan balitanya?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terpaan manajemen informasi PIN melalui program imunisasi terhadap perilaku masyarakat, dalam hal ini para orang tua/pasangan suami istri yang mempunyai balita dalam mengimunisasi balitanya pada PIN.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan fungsi manajemen informasi melalui program imunisasi dalam hubungannya dengan perubahan perilaku ibu.
2. Medeskripsikan manajemen informasi melalui para pemuka masyarakat terhadap perilaku masyarakat dalam mengimunisasi balitanya pada pelaksanaan PIN.
3. Mendeskripsikan perbedaan antara informasi PIN yang berkualitas dengan para pemuka agama.

4. Memformulasikan temuan-temuan penelitian menjadi mutu bahan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara sinergis guna pemberantasan penyakit polio di Kota Bandung.

1.4. Relevansi Topik

Pembangunan pendidikan nasional dan pengembangan kebudayaan nasional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional seperti dinyatakan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab II pasal 4 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Salah satu upaya ke arah itu antara lain melalui pendidikan luar sekolah. Model pendidikan ini bisanya dikembangkan oleh institusi-institusi yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk di antaranya bidang kesehatan. Teknik yang dilaksanakannya sangat bervariasi, tetapi secara prinsip institusi tersebut tidak terlepas upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang tertentu.

Secara operasional bahkan tidak bisa melepaskan diri dari prinsip-prinsip administrasi pendidikan.

Menurut Nasution (dalam Soepardi, 1988 : 24), administrasi pendidikan adalah : “Suatu proses keseluruhan semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan”.

Hampir sama dengan definisi di atas, Purwanto (1987 : 3) berpendapat bahwa : “Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun material, yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan”.

Mengacu kepada berbagai definisi Soepardi (1988 : 25) menyimpulkan bahwa administrasi pendidikan mencakup ciri-ciri :

1. Tujuan pendidikan menjadi sasaran kegiatan bersama.
2. Kerjasama dilakukan oleh satu kelompok atau lebih
3. Kegiatan bersama itu merupakan suatu proses
4. Kelompok kerjasama itu merupakan korps
5. Pendayagunaan sumber-sumber
6. Direction, controll, dan management adalah aspek-aspek yang esensial sebagai usaha untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mengacu kepada pengertian-pengertian di atas terlihat bahwa pendidikan berorientasi kepada tujuan pendidikan yakni mencerdaskan

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Demikian pula dengan pendidikan terhadap para ibu di bidang kesehatan, khususnya untuk mengimunitasikan balitanya pada Pos-pos PIN terdekat pada dasarnya merupakan suatu model pendidikan luar sekolah yang mengarah kepada pengembangan wawasan di bidang kesehatan balita.

Secara konseptual, model pendidikan ini mengacu kepada konsep *resource – based learning*. Menurut Nasution (1992 : 18) konsep *resource – based learning* dimaksudkan sebagai “segala bentuk belajar yang langsung menghadapkan murid dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok dengan segala kegiatan belajar yang bertalian dengan itu, jadi bukan dengan cara yang konvensional di mana guru menyampaikan bahan pelajaran kepada murid. Dengan kata lain sumber belajar murid bukan semata-mata hanya guru, melainkan dari berbagai sumber, dan salah satu di antaranya adalah informasi melalui pers atau media massa.

Konsep ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan bertalian dengan sejumlah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nasution (1992 : 19) berpendapat bahwa perubahan-perubahan itu mencakup :

1. Perubahan dalam sifat dan pola ilmu pengetahuan manusia.
2. Perubahan dalam masyarakat dan tafsiran kita tentang tuntutananya.
3. Perubahan tentang pengertian kita tentang anak dan caranya belajar.
4. Perubahan dalam media komunikasi..

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat :

1. Penelitian ini diharapkan memberikan hasil guna nyata bagi kepentingan akademis di bidang ilmu-ilmu sosial umumnya, khususnya untuk pengembangan informasi ilmu manajemen, ilmu komunikasi, ilmu pendidikan terutama dalam masalah kualitas informasi melalui pemuka agama terhadap perilaku masyarakat dalam mengimunnisasi balita di kota Bandung.
2. Manfaat bagi kepentingan para praktisi yang terlibat dalam penyampaian informasi PIN seperti surat kabar dan para pemuka masyarakat.

1.6. Landasan Dasar Teori dan Asumsi

1. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian (paradigma penelitian) merupakan suatu model yang dijadikan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Bogdan

Biklen (1992 : 33) menyatakan bahwa paradigma adalah sejumlah asumsi, konsep atau proposisi-proposisi yang diyakini kebenaran atau ketidakbenarannya yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak lainnya. Karena itu manusia adalah makhluk komunikasi. Mereka melakukan interaksi sosial antara individu dengan individu maupun dengan kelompok. Dengan saling komunikasi itu maka satu sama lain bisa mengetahui apa yang terjadi dan apa yang semula tidak diketahui oleh dirinya.

Littlejohn (1983 : 47) mengatakan : *“Without communication of information sharing human society as we know it would disappear”*. Dalam kaitan ini Samsudin (1993 : 1) menyatakan bahwa “Manusia berkomunikasi dengan sasamanya karena mereka saling membutuhkan dan juga karena manusia hanya bisa berkembang melalui komunikasi. Dalam melakukan hubungan atau berkomunikasi manusia akan masuk dalam proses hubungan atau komunikasi dari tahap satu ke tahap lainnya. Dari tahap semula tidak tahu, dari tahu kemudian melaksanakan apa yang diketahuinya itu. Sedangkan menurut Garna (1992 : 4) bahwa : “Kehidupan manusia itu adalah proses dari satu tahap hidup ke tahap lainnya, karena itu perubahan sebagai proses dapat menunjukkan perubahan sosial dan perubahan budaya, atau berlaku keduanya pada suatu runtutan proses itu.

Jika manusia menginginkan keberadaan dirinya, keadaan keluarganya, anak-anaknya lebih baik, dan bayi-bayi bebas dari penyakit polio, itu adalah merupakan pengaruh dari proses hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Orang lain adalah pihak yang dijadikan komunikasinya, bisa sesama manusia lain berkedudukannya lebih tahu dan lebih mengerti dari dirinya seperti para pemuka agama, bisa juga pihak yang diajak komunikasinya itu surat kabar.

2. Asumsi Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan premis-premis bahwa :

1. Pendekatan dalam fungsi manajemen informasi untuk memperoleh informasi yang berkualitas agar masyarakat mengerti tentang pentingnya pemberantasan penyakit sebagai proses pendidikan ibu dan anak.
2. Manajemen informasi yang berkualitas dapat dijabarkan ke dalam bentuk implementasi program imunisasi secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
3. Kebijaksanaan program PIN pada intinya memprioritaskan bagi semua anak usia 0 – 5 tahun, kekuatan dan kelemahan internal manajemen informasi serta dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang eksternalnya. Untuk itu efektivitas manajemen pendidikan dipertaruhkan, sebab 85 % dan masalah-masalah tentang mutu terletak pada pelaksanaan manajemen yang efektif dan efisien (Depdikbud, 1994 : 101).

Berdasarkan kerangka berpikir paradigma dan asumsi penelitian, berikut ini penulis kemukakan penelitian yang dijadikan acuan dalam mengkaji memakai dan menganalisis fenomena berkaitan dengan implementasi manajemen informasi dalam upaya pemberantasan penyakit polio.

1. Penyajian informasi yang bermutu merupakan prioritas dalam program imunisasi. Keberhasilan program imunisasi merupakan langkah awal dalam proses pendidikan anak balita yang secara dini sudah dipersiapkan untuk memasuki dunia pendidikan formal.
2. Dalam banyak hal, upaya pemberantasan penyakit polio masih banyak menemui kendala baik karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam anggaran, sumberdaya manusia maupun keterbatasan dalam masyarakat.
3. Peningkatan mutu menjadi sesuatu yang bukan untuk diwujudkan jika ingin memperoleh hasil yang optimal. Demikian pula dengan upaya perbaikan pendidikan secara terus menerus, bertahap dan berkelanjutan dan dilakukan oleh semua bagian. Semua dengan prinsip *continuous improvemen*” agar dapat diimunisasi secara dini agar tidak terkena penyakit polio di seluruh wilayah kota Bandung.
4. Berdasarkan ketiga pokok pikiran tersebut di atas dipandang perlu untuk dievaluasi implementasi sistem informasi manajemen untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada di lapangan baik internal maupun eksternal

sehingga dalam perencanaan penyajian informasi dapat dilakukan lebih akurat dan lebih baik.

5. Stakeholder produk informasi adalah pemerintah, masyarakat dan dunia kesehatan yang senantiasa memerlukan sumberdaya manusia dan media yang berkualitas yang merupakan keluaran dari lembaga informasi yang memadai. Maka upaya diprioritaskan dalam bentuk informasi yang akurat diarahkan pada upaya peningkatan mutu informasi.
6. Implementasi manajemen informasi program imunisasi yang telah dilakukan dengan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam upaya peningkatan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, sekaligus merupakan pendidikan terhadap ibu dan anak balita.
7. Selain komitmen semua pihak berbagai pendekatan dan upaya intervensi ke arah terciptanya masyarakat informasi dan mutu informasi sangat diperlukan mengingat perkembangan arus informasi di era globalisasi ini sangat beragam. Oleh karenanya informasi perlu dirancang secara sistematis yang didasarkan atas hasil analisis.

Mengacu kepada penelitian ini, paling tidak terdapat tiga konsep utama yang memerlukan penjelasan yang diukur melalui variabel-variabel penelitian yaitu : sistem informasi manajemen dan manajemen informasi, efektivitas program imunisasi, dan perilaku ibu.

1. Sistem Informasi Manajemen

Pembicaraan tentang Sistem Informasi manajemen seolah-olah sudah mengarahkan pemikiran pada suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data di sini dapat berarti penunjang pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut.

Pembahasan mengenai sistem informasi tidak terlepas dari pembahasan mengenai data, informasi, sistem dan manajemen, karena unsur-unsur tersebut satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan.

a. Sistem

Menurut Lembaga Administrasi Negara, (1989 : 1) pengertian sistem adalah sebagai berikut :

Suatu totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh - mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu.

Prajudi Atmosudirdjo (1977 : 231) dalam bukunya berjudul

Pengambilan Keputusan mengemukakan pengertian sistem sebagai berikut :

Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas obyek-obyek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan, atau berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Menurut Idochi Anwar (1986 : 33), "modul (unit) sistem mempunyai empat unsur yaitu : masukan (input), pemrosesan (processing), keluaran (output), dan balikan (feedback)".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan teori sistem menekankan kepada adanya hubungan-hubungan di antara bagian-bagian atau komponen-komponen yang membentuk suatu keseluruhan. Setiap sistem terdiri dari berbagai subsistem / komponen.

Dalam kaitannya dengan kajian penelitian ini, maka sistem dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai sistem yang terbuka yang artinya menerima pengaruh dari luar. Menurut Rusadi Kantaprawira (1990 : 21) ciri-ciri sistem terbuka adalah sebagai berikut :

1. Adanya input energi.
2. *Throughput*.
3. Output berupa energi dan informasi terhadap lingkungannya.
4. Sifat siklus (keberulangan) peristiwa atau kejadian (dalam kenyataannya, keberulangan itu hanya bersifat mirip dan tidak pernah sama benar).
5. Entropi negatif (*negentropy*) yaitu dalam rangka mencegah kepunahan.
6. Input informasi dan *negative feedback* sebagai antisipasi terhadap kelainan atau penyimpangan.
7. Keadaan mantap (*steady state*) dan keseimbangan dinamis (*dynamic homeostatis*).
8. Diferensiasi struktur.
9. Equifinality, yakni tujuan-tujuan yang sama dapat dicapai melalui penggunaan cara-cara yang berbeda.

Input dimaksudkan sebagai masukan kedalam organisasi baik berupa informasi maupun energi, konversi merupakan proses transformasi dari input menjadi output. Sedangkan output adalah produk yang dihasilkan oleh organisasi melalui konversi (proses).

b. Data

Menurut Riley (Idochi Anwar, 1986 : 9) : "*Data are language, mathematical, or other symbolic surrogates that are generally agreed upon to represent people, object, event and concepts* (data adalah simbol-simbol bahasa, matematis atau simbol-simbol lain yang disepakati secara umum untuk menyatakan manusia atau masyarakat, obyek, peristiwa dan konsep-konsep)".

Selanjutnya Burch dan Stater (Idochi Anwar, 1986 : 9) mengemukakan bahwa data merupakan fakta yang masih mentah (*raw facts*) yang berdiri sendiri-sendiri.

Sedangkan menurut J. Djamil, (1990 : 6) :

Data adalah fakta dan angka yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, dan biasanya berbentuk catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan.

Menurut Dann Sugandha (1982 : 81) :

Data berarti rangkaian catatan (jadi jangan disebut data-data karena data saja sudah berarti jamak) mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi atau suatu keadaan tertentu (fakta). Data yang sudah diolah sesuai dengan tujuan tertentu dari pihak yang membutuhkannya (pemimpin /

manajer / administrator) disebut informasi. Jadi informasi berarti kesimpulan dari pengolahan data yang faktual, yang sesuai dengan tujuan manajemen atau administrasi. Misalnya untuk membuat keputusan, merencanakan, mengorganisasikan atau menempatkan orang atau staffing, pengawasan, koordinasi, penilaian dan sebagainya. Jadi informasi diperlukan bukan hanya sekedar untuk membuat keputusan. Di dalam setiap administrasi catatan-catatan merupakan suatu hal yang dianggap penting. Catatan ini biasanya berupa pesan yang berisi informasi, atau hanya sekedar data.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik sesuatu pengertian bahwa data merupakan fakta yang belum terorganisasi dengan baik, sehingga keberadaannya baru merupakan komponen dasar terbentuknya suatu informasi.

c. Pengertian Informasi

Kedudukan informasi dalam suatu organisasi digambarkan dengan tepat oleh Mordick dkk (1982) sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. Analogi ini memperlihatkan betapa pentingnya informasi bagi kehidupan organisasi. Sebagai “darah” organisasi, informasi adalah salah satu unsur penting yang memberi kemungkinan hidup, berkembang, dan memperlancar kegiatan organisasi baik pada tingkat pembuatan kebijakan maupun pada tingkat operasional. Ia diakui sebagai salah satu sumberdaya utama organisasi yang menghendaki tindakan manajemen yang memadai terhadapnya (Parker, 1989). Alirannya dari satu unit ke unit yang lain dalam organisasi memungkinkan unit-unit itu dapat berfungsi dengan lancar dalam suatu harmoni. Ia berpotensi mengikat unit-unit organisasi untuk bertindak secara tertentu atas dasar pijakan

informasi yang sama. Dengan demikian keberadaan informasi dengan jumlah dan mutu yang memadai adalah suatu kebutuhan demi kelangsungan hidup organisasi.

Pada abad modern ini kantor-kantor selalu disibukkan dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan penanganan informasi yang bila tidak digunakan sistemnya yang sempurna dengan teknologi yang canggih dari hari ke hari naskah-naskahnya akan menggunung dan kantor-kantor tenggelam oleh informasi.

Informasi untuk pembuatan keputusan ini dikumpulkan, diproses, dicatat ke dalam serta dikomunikasikan melalui jaringan kegiatan kantor pada pelosok organisasi maupun keluar organisasinya untuk memudahkan hubungan intern maupun ekstern.

Pawit M. Yusup (1988 : 3) mengartikan informasi adalah : "suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat".

Selanjutnya pengertian informasi menurut Burch dan Strater (Idochi Anwar, 1987 : 10) yaitu : "*Data that has been processed to obtain results of relationship is called Information.* (Informasi adalah data yang telah diproses untuk menghasilkan hubungan diantara data tersebut)".

Selanjutnya menurut George R. Terry, sebagaimana dikutip Moekijat (1991: 9), mengatakan bahwa *Information is meaningfull data that conveys*

usable knowledge (informasi adalah data yang penting untuk memberikan pengetahuan yang berguna)".

Pengertian informasi menurut Davis (dalam Adiwardana, 1988 : 28) adalah sebagai berikut : "Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau masa yang akan datang".

Menurut Davis data belum bisa disebut informasi jika tidak bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Hubungan antara data dengan informasi adalah seperti bahan baku dengan barang jadi. Artinya sistem pengolahan informasi mengolah data menjadi informasi. Atau lebih tepatnya sistem pengolahan mengolah data dari bentuk belum berguna menjadi bermanfaat bagi penerimanya.

Informasi menurut Rudi Bretz, yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendy (1984 : 72) mengatakan bahwa "*Information is what is perceived* (Informasi adalah apa yang dipahami)".

Sondang P.Siagian (1988 : 51) mengemukakan tidak ada kegiatan yang dilakukan di dalam dan oleh masyarakat yang tidak memerlukan informasi. Sebaliknya semua kegiatan menghasilkan informasi baik yang berguna bagi organisasi yang melaksanakan kegiatan tersebut maupun bagi organisasi lain di luar organisasi yang bersangkutan. Oleh karena pendapat di atas itu beralasan,

maka informasi berguna untuk semua macam dan bentuk kegiatan dalam masyarakat.

Menurut Idochi Anwar (1987 : 29), informasi sudah merupakan komoditi yang nilainya sudah meningkat dan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengontrol kegiatan secara efektif. Informasi merupakan sumber penting, sama seperti sumber-sumber lainnya yang sering dikenal dengan 4 M (men, machine, material, money atau MABU : manusia, alat-alat, bahan dan uang). Informasi merupakan sistem paperwork yang analog dengan material sebagai "sistem produksi".

Berdasarkan beberapa definisi informasi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas pada dasarnya informasi diperoleh dari mengelola data, baik data intern maupun data ekstern menjadi suatu informasi sesuai dengan yang diinginkan sehingga bermanfaat bagi penerima informasi.

Agar suatu informasi dapat efektif dan efisien, maka menurut M.J. Riley (Idochi Anwar, 1986 : 70), perlu kriteria tertentu, yaitu :

- a. Akurasi (*accuracy*), berarti bahwa informasi hendaknya bebas dari kekeliruan-kekeliruan komputasi dan transkripsi.
- b. Komprehensif (*comprehensiveness*), berarti dapat merupakan sesuatu yang dianggap lengkap untuk suatu kepentingan atau kegiatan tertentu.
- c. Kesesuaian (*appropriateness*), berarti bahwa informasi hendaklah relevan terhadap tujuan-tujuan pengambilan keputusan.
- d. Ketepatan waktu (*timeliness*), dimaksudkan bahwa informasi hendaklah tersedia jika dibutuhkan.
- e. Kejelasan (*clarity*), berarti informasi itu bebas dari keraguan.

- f. Fleksibel (*flexibility*), mempunyai daya adaptasi terhadap kebutuhan yang berbeda.
- g. Verifiabilitas (*verifiability*), berarti bahwa informasi itu dapat dibuktikan kebenarannya.
- h. Bebas dari bias (*freedom from bias*).
- i. Mudah untuk dicapai/diperoleh (*accessibility*).
- j. Mempunyai bentuk (*form*).
- k. Skop/ruang lingkup (*scope*).
- l. Keaslian (*origin*), dan
- m. Keefektifan biaya (*cost effectiveness*).

d. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi di sini dimaksudkan sebagai sistem informasi manajemen yang menurut Gordon B. Davis (1985 : 3) adalah : "istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (*integrated*), untuk menyiapkan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan".

Pengertian sistem informasi manajemen menurut Indro Suwandi (1971) adalah : Suatu sistem yang terdiri dari manusia, uang, materi, mesin, informasi, organisasi, prosedur, dan komunikasi yang berkemampuan mengumpulkan, validasi, mengolah, menyimpan, mengambil kembali, dan peresentasi data untuk dipakai oleh management dalam melaksanakan tugasnya. Datanya mencakup sumber-sumber yang berguna bagi organisasinya. Pengolahan data mencakup pencatatan, perbandingan, penggabungan, tabulasi, peringkasan, dan analisa ilmiah.

Oleh karena itu jelas bahwa suatu sistem informasi manajemen adalah alat yang dapat dan harus dipergunakan oleh kelompok pimpinan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan secara menyeluruh, akan membutuhkan informasi secara terpadu yang diperoleh melalui pelaksana. Sistem Informasi Manajemen termaksud dibutuhkan untuk menetapkan suatu keputusan, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Sistem informasi manajemen merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks, karena merupakan keseluruhan proses mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, menyimpan, mengambil kembali dan menyalurkan informasi dengan melibatkan manusia, organisasi, prosedur materi dan lain-lain, sehingga menjamin tersedianya informasi bagi aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Keterpaduan informasi akan menunjang pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Keterpaduan informasi akan menunjang pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah suatu terapan teknologi baru kepada persoalan keorganisasian dalam pengolahan transaksi dan pemberian informasi bagi kepentingan keorganisasian. Struktur sebuah Sistem Informasi Manajemen

terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan database, prosedur serta petugas operasi.

Sebagai suatu proses kegiatan maka Sistem Informasi tidak terlepas dari sistem, prosedur dan tata kerja. Menurut F.X. Soedjadi (1988 : 65), pengertian, sistem, prosedur, dan tata kerja adalah :

1. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas yang diperoleh dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, jarak, biaya, dan sebagainya.
2. Prosedur pada pokoknya adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut, tahap demi tahap serta jelas menunjukkan jalan atau arus (*flow*) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan berasal, kemana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya, dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan/tugas.
3. Sistem adalah totalitas (kebutuhan) komponen yang terdiri dari sub komponen-sub komponen yang saling berkaitan dan saling menentukan, sehingga membentuk sesuatu kebulatan yang terpadu. Oleh karena itu sistem merupakan suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan atau pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu pula.

Selain sistem informasi manajemen, dalam kondisi tertentu, seorang manajer dapat menggunakan stakeholder information system (sistem informasi

pihak-pihak yang berkepentingan). Menurut Covey (1997 : 279) : "stakeholder information system merupakan suatu perangkat diagnostik yang canggih untuk memudahkan para eksekutif mengumpulkan dan mengatur data serta memahami apa yang sedang terjadi di dalam dan di luar organisasi". Atas dasar teknik ini bisa dikaji berbagai permasalahan organisasi secara lebih rinci, sehingga bisa diambil suatu keputusan yang akurat.

2. Efektivitas Implementasi Program Imunisasi Balita

Efektivitas implementasi program imunisasi Balita merupakan suatu kondisi pelaksanaan program imunisasi Balita sesuai dengan rencana. Dalam hal ini penyelenggaraan imunisasi polio terhadap balita dilaksanakan pada Pos-pos PIN yang berada di setiap kelurahan di Kota Bandung. Sesuai dengan komitmen kita untuk menghapuskan polio pada Tahun 2000, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan memberdayakan media massa (surat kabar) dan para pemuka agama (tokoh masyarakat) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi polio pada Balita.

3. Konsep Perilaku

Manajemen informasi atau program imunisasi pada dasarnya dikemas dalam bentuk informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat. Informasi ini sekaligus menjadi stimulus atau rangsangan yang datang menyentuh indera dan organisme individu, yang selanjutnya akan berpengaruh atau memberi akibat

terjadinya respon individu terhadap gagasan atau ide yang diinformasikan. Respon individu menimbulkan efek kognitif dan behavioral. Dalam ilmu komunikasi, efek ini disebut efek komunikasi massa, yaitu suatu keadaan yang timbul atau terjadi sebagai akibat menggunakan media massa yang berubah sikap sehingga tergeraknya suatu tindakan tertentu.

Steven M. Chaffe (dalam Mowlana, 1989 : 117) mengemukakan tiga pendekatan untuk melihat efek media massa, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pesan dan media, pendekatan dengan melihat jenis dan khalayak (perubahan kognitif, afektif dan behavioral) dan pendekatan satuan khalayak (individu, kelompok atau organisasi kemasyarakatan). Bila ketiga pendekatan itu digabung, maka ada 18 kemungkinan efek yang terjadi seperti yang dapat dilihat pada matriks berikut :

SARANA	MEDIA			PESAN		
	Kognitif	Afektif	Behavioral	Kognitif	Afektif	Behavioral
Individu	1	2	3	4	5	6
Interpersonal	7	8	9	10	11	12
Sistem	13	14	15	16	17	18

Sumber : Rakhmat, 1991 : 212

Matriks memperlihatkan bahwa baik media fisik maupun pesan menimbulkan efek kognitif, afektif dan behavioral pada sasaran atau khalayak.

Efek Kognitif

Efek Kognitif ditimbulkan media massa melalui pengorganisasian citra dalam diri khalayak. Informasi yang disiarkan melalui media massa dapat membentuk, memperkuat ataupun mengubah citra yang sudah ada dalam diri khalayak.

Schramm (1974 : 83) mengatakan, “citra dalam pikiran manusia hanya merupakan metafor/kiasan yang menunjukkan keseluruhan informasi tentang dunia yang telah diolah, diorganisasikan dan disimpan individu”.

Walter Lippman (dalam Rakhmat, 1985 : 221) menyebut citra sebagai “*Pictures in head* sebagai gambaran tentang realitas yang tidak realitas, yang tidak selalu sama dengan realitas karena citra adalah dunia menurut persepsi individu yang belum tentu sesuai dengan realita yang ada”.

Krech (1982 : 21-22) menyebutkan bahwa faktor-faktor determinan atau penentu kognisi adalah (1) lingkungan fisik dan sosial, (2) struktur psikologis (3) tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan, dan (4) pengalaman-pengalaman masa lalu individu. Selanjutnya dalam hubungan dengan perubahan kognisi, Krech menyebutkan tiga teori yaitu (1) perubahan kognisi secara sejalan dengan perubahan-perubahan dalam informasi dan kebutuhan-kebutuhan individu (2) perubahan kognisi sebagian diatur oleh karakteristik sistem kognisi sebelum atau mendahuluinya, dan (3) perubahan kognisi yang diatur oleh faktor kepribadian.

Efek Afektif

Efek afektif komunikasi massa berhubungan dengan gejala emosi yang terjadi kepada khalayak ketika sedang mengikuti media massa. Hal ini tidak dapat diamati secara langsung tetapi hanya dapat diamati oleh perubahan perilaku. Seseorang yang ada di negeri orang atau kota sendiri, jauh dari sanak keluarga, jauh dari kampung halaman, tiba-tiba air mata berurai ketika mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan. Berurai air mata adalah gambaran atau manifestasi dari emosi setelah dirinya tersentuh lewat lagu kebangsaan Indonesia Raya atau sentuhan komunikasi.

Efek Behavioral

Efek behavioral atau tindakan atau tingkah laku massa dapat dilihat dari perubahan perilaku setelah menerima informasi melalui media massa. Efek behavioral ini dilandasi oleh efek kognisi dan efek afektif, karenanya tanpa adanya efek afektif, efek behavioral tidak akan terjadi. Dengan kata lain efek behavioral adalah klimaks dari proses sentuhan komunikasi massa.

Seorang petani rajin mengikuti siaran pedesaan RRI tentang pertanian, atau pembaca surat kabar yang rajin membaca perihal cara penggunaan pupuk urea tablet, kemudian melaksanakan atau mempreaktekkan apa yang didengar atau apa apa yang dibacanya sesuai dengan aturannya, itulah yang merupakan efek behavioral.

Demikian juga dalam perilaku masyarakat setelah menerima pesan PIN, baik melalui surat kabar maupun lewat pemuka masyarakat akan terdapat variabel-variabel sebagai berikut :

Perilaku masyarakat setelah menerima pesan PIN
<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan - Mendiskusikan - Menularkan kembali kepada pihak lain - Mengimunitasikan balitanya ke pos-pos PIN

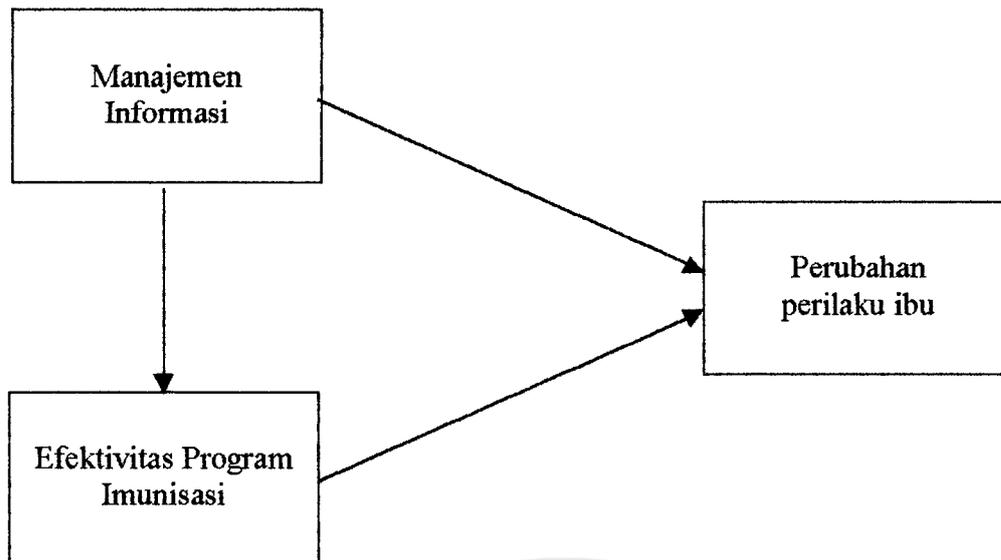
Beberapa peristilahan operasional untuk membatasi dalam penelitian ini, peneliti mengumsikan 3 (tiga) variabel utama yang akan diukur yaitu :

1. Manajemen Informasi.
2. Efektivitas program, artinya bahwa penggunaan media masa dapat mempengaruhi perilaku ibu untuk melaksanakan imunisasi nasional.
3. Perilaku ibu, adalah respon individu terhadap imunisasi sebagai efek dan penyampaian informasi melalui media massa.

Indikatornya :

- a. Mendiskusikan program untuk dikaji
- b. Menularkan kembali kepada pihak lain
- c. Mengimunitasikan balitanya.

Dengan demikian dari uraian tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini bila digambarkan adalah :



Gambar 1: Kerangka Penelitian

1.7. Hipotesis

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan fungsional antara manajemen informasi dengan efektivitas program imunisasi.
2. Terdapat hubungan fungsional antara manajemen informasi dengan perubahan perilaku ibu.
3. Terdapat hubungan fungsional antara program imunisasi dengan perubahan perilaku ibu.

1.8. Definisi Operasional Variabel

Untuk menjabarkan hipotesis tersebut, diperlukan definisi operasional variabel yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen Informasi, adalah proses pengelolaan informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat dengan pendekatan sistem yang mencakup input, proses, output, dan feedback, dengan sub variabelnya :
 - a. Input data, yaitu pengumpulan dan seleksi data tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan balita pada umumnya dan penyakit polio pada khususnya, dengan indikatornya :
 - 1) Pendataan terhadap keluarga yang memiliki balita
 - 2) Pendataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
 - 3) Pendataan mencakup kesehatan balita
 - b. Proses pengolahan data, adalah kegiatan mengolah data berdasarkan input data dengan memperhatikan aspek-aspek :
 - 1) Keterampilan personil pengolah data
 - 2) Kejelasan sasaran pendataan
 - 3) Tipe pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data
 - 4) Dukungan fasilitas fisik pengolahan data

c. Output adalah informasi yang akan disebarakan kepada masyarakat berdasarkan hasil pengolahan data. Penyebaran informasi dilakukan melalui :

- 1) Penyebaran informasi melalui media massa surat kabar
- 2) Penyebaran informasi melalui majalah
- 3) Penyebaran informasi melalui brosur/booklet
- 4) Penyebaran informasi melalui televisi
- 5) Penyebaran informasi melalui radio
- 6) Penyebaran informasi melalui tokoh masyarakat

d. Feedback adalah umpan balik dari output sebagai input bagi proses data selanjutnya, dengan indikatornya :

- 1) Sikap masyarakat terhadap PIN
- 2) Partisipasi masyarakat terhadap PIN

2. Efektivitas Program Imunisasi

Soejadi (1989 : 37) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pernyataan kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (target achieved misalnya, angka produksi, ekspor, income bertambah, persentase lulusan suatu sekolah bertambah, jumlah pegawai terdidik meningkat, jumlah keputusan yang dikeluarkan bertambah, dan lain-lain). Namun target-target yang telah dicapai itu tentu saja juga harus dihubungkan dengan mutunya.

Dalam kaitan dengan efektivitas program imunisasi, maka diartikan sebagai terlaksananya program imunisasi sesuai dengan target waktu, biaya dan tenaga yang telah ditetapkan. Dengan demikian sub variabel dari efektivitas program imunisasi adalah :

- a. Penggunaan waktu, yaitu pemanfaatan waktu PIN sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan indikatornya :
 - 1) Waktu yang digunakan untuk persiapan petugas
 - 2) Waktu penyelenggaraan PIN
 - 3) Waktu yang digunakan untuk pelayanan kepada pemilik balita
- b. Penggunaan biaya, yaitu pemanfaatan biaya penyelenggaraan PIN sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan indikatornya :
 - 1) Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan PIN
 - 2) Pengeluaran biaya oleh peserta PIN
 - 3) Keberatan pemilik balita atas biaya untuk PIN
- c. Penggunaan tenaga, yaitu pemanfaatan tenaga untuk penyelenggaraan PIN baik oleh petugas maupun oleh orang tua balita, dengan indikatornya :
 - 1) Penggunaan tenaga petugas penyelenggara PIN
 - 2) Penggunaan tenaga oleh orang tua balita
 - 3) Pengorbanan waktu orang tua balita

3. Perubahan Perilaku Ibu

Perubahan perilaku ibu adalah suatu perwujudan sikap para ibu untuk melaksanakan program imunisasi sebagaimana mestinya, dengan sub variabelnya :

- a. Mendeskripsikan program PIN, yaitu kemampuan orang tua balita menggambarkan program PIN secara umum, dengan indikatornya :
 - 1) Pengetahuan umum tentang PIN
 - 2) Kemampuan menjelaskan tentang program PIN
 - 3) Kemampuan untuk mengingatkan pihak lain tentang pentingnya program PIN
- b. Mendiskusikan, yaitu kemampuan mendiskusikan program PIN dengan pihak lain, dengan indikatornya :
 - 1) Mendiskusikan program PIN dengan orang lain
 - 2) Bertanya tentang program PIN kepada petugas
 - 3) Kemampuan menjawab pertanyaan orang lain dalam diskusi
- c. Menularkan kembali kepada pihak lain, yaitu kemampuan mengajak orang lain untuk melaksanakan program PIN dengan indikatornya :
 - 1) Mengajak orang lain untuk mengimunitasikan bayinya
 - 2) Membujuk orang lain untuk mengimunitasikan bayinya
 - 3) Menularkan pengetahuan tentang PIN kepada orang lain

d. Mengimunitasikan balitanya ke pos-pos PIN, yaitu kemampuan orang tua balita untuk melaksanakan imunisasi balitanya ke pos-pos PIN, dengan indikatornya :

- 1) Melaksanakan imunisasi balitanya ke Pos PIN terdekat
- 2) Merasakan pentingnya imunisasi bagi balita
- 3) Status kesehatan balita

1.9. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratoris. Menurut June Audrey True (1992 : 53), “metode ini digunakan bagi peneliti yang tidak mengetahui apapun tentang subyek penelitian, tetapi memperkirakan mampu memahami subyek tersebut secara lebih baik”. Penggunaan metode ini didasarkan kepada pertimbangan peneliti untuk mendalami pelaksanaan manajemen informasi dalam kaitannya dengan efektivitas program imunisasi dalam rangka mengubah perilaku ibu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

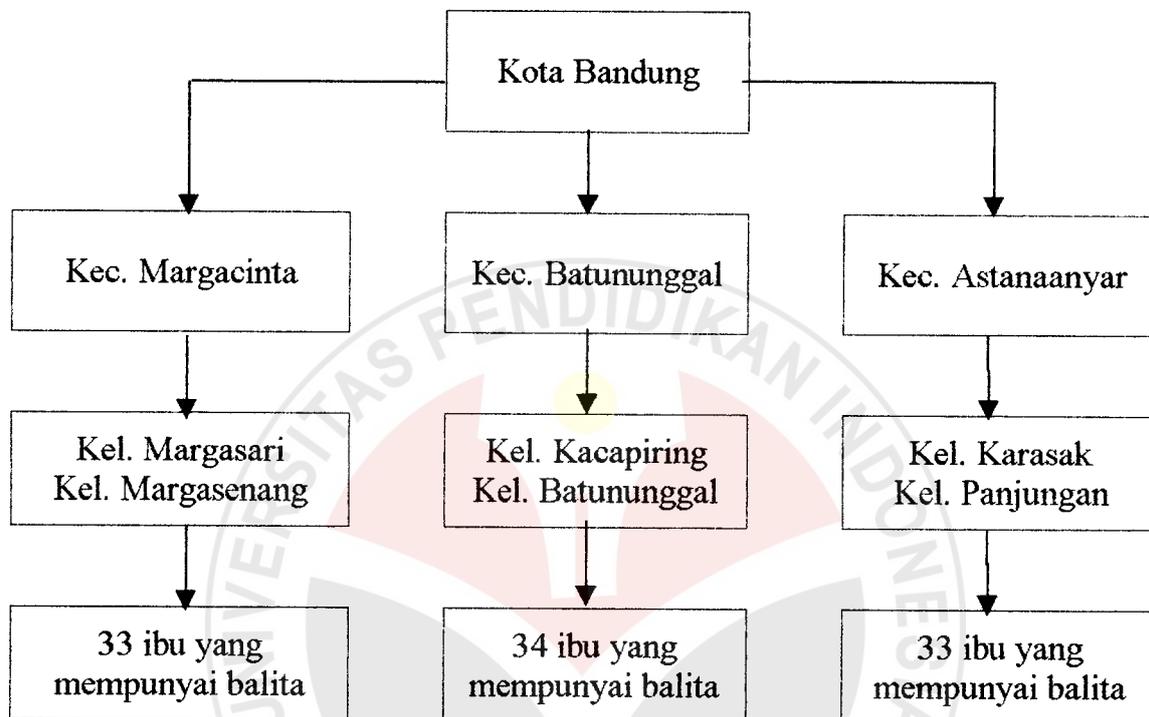
- a. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah informan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang aktual berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
- c. Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner terhadap sejumlah responden.
- d. Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para ibu yang mempunyai anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) pada tahun 1999 yang berdomisili di wilayah Kota Bandung.

Rancangan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multistage cluster sampling*. Pada tahap pertama dipilih kecamatan sebagai klaster I melalui simple random sampling (SRS), kemudian dipilih lagi melalui SRS kelurahan sebagai klaster II. Kemudian terakhir dipilih melalui SRS para ibu atau pasangan suami istri yang mempunyai balita sebagai klaster III. Dengan demikian kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung tempat berdomisili para ibu atau pasangan suami istri yang mempunyai balita dijadikan

Satuan Sampling Primer, kemudian dijadikan sebagai Satuan Sampling Sekunder (SSS), dan para ibu atau pasangan suami istri yang mempunyai balita sebagai Satuan Sampling Elementer (SSE).



Gambar 2 : Skema Tingkat Pemilihan Satuan Sampling

4. Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis, digunakan metode analisis naturalistik. Metode analisis dimaksudkan sebagai proses pemikiran dan telaahan terhadap data penelitian. Menurut Nasution (1996 : 5), metode analisis ini dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut Nasution, penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasan dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian ini bukanlah mencari “kebenaran” mutlak, karena hal itu merupakan pekerjaan ahli filsafat atau teologi. Paling tidak hasil yang didapat dari penelitian ini akan mendekati kebenaran relatif.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution (1996 : 126), analisis adalah “proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan”. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Tanpa kategorisasi atau klasifikasi data akan terjadi chaos. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan diuji dalam berbagai situasi lain.

Berkaitan dengan penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah induksi analitik. Noeng Moehadjir (1992 : 175) mengatakan bahwa : “induksi analitik merupakan suatu pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data baik untuk mengembangkan maupun menguji teori.” Teknik ini bertolak dari problem atau pertanyaan isu spesifik yang dijadikan fokus penelitian. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengembangkan model deskriptif

penelitiannya. Data dikumpulkan dengan wawancara bebas, observasi partisipan dan analisis dokumentasi.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Nasution (1996 : 129), yaitu :

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk laporan/uraian yang terinci. Laporan-laporan tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Display data, yaitu membuat matrik untuk menjelaskan data yang telah diklasifikasikan. Untuk itu dilakukan tabulasi data dengan melakukan penghitungan frekuensi dengan cara “mengijir” (*tallying*). Dalam hal ini setiap kasus yang telah berkode dimasukkan ke dalam kategori yang bersangkutan secara simbolik (Koentjaraningrat, 1997 : 278).
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yakni kesimpulan disusun atas hasil verifikasi selama penelitian berlangsung.

Secara operasional, teknik pengumpulan dan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut :

Instrumen pengumpul data disebarkan kepada responden pada awal bulan Juni 2000 kepada seorang petugas kecamatan yaitu Juru Penerang dari kecamatan yang ditetapkan sebagai sampel, yaitu Kecamatan Margacinta, Batununggal, dan Astanaanyar. Petugas kecamatan ini berperan sebagai

koordinator untuk pelaksanaan penyebaran angket di kelurahan yang ditunjuk yang dalam hal ini Kelurahan Margasari dan Margasenang untuk Kecamatan Margacinta; Kelurahan Kebonwaru dan Kacapiring untuk Kecamatan Batununggal; serta Kelurahan Karasak dan Panjungan untuk Kecamatan Astanaanyar. Untuk memudahkan teknik penyebaran angket, penulis menunjuk seorang petugas kelurahan untuk berperan sebagai penyebar dan pengumpul angket. Petugas kelurahan ini diberi wewenang untuk menyebarkan angket langsung kepada responden yang ada di wilayahnya para pertengahan bulan Juni 2000 dan diperkirakan selesai pada akhir bulan Juni 2000.

Data yang diperoleh dari responden kemudian diolah. Pengolahan data yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan pendapat Surakhmad (1995 : 110), yaitu :

Mengolah data adalah usaha yang konkrit untuk membuat data berbicara, sebab betapapun besarnya jumlah dan tingginya nilai data yang terkumpul (sebagai fase pengumpulan data) apabila tidak disusun dalam suatu organisasi dan diolah menurut sistematika yang baik, niscaya data itu merupakan bahan-bahan yang membisu seribu bahasa.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan pengolahan data adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi angket, dimaksudkan untuk mengetahui apakah responden telah mengisi angket yang penulis sebarkan yang telah memenuhi syarat untuk dianalisis. Kriteria yang digunakan dalam menyeleksi angket adalah sebagai berikut :

- 1) Angket yang disebarakan diharapkan semuanya kembali (100%).
 - 2) Tidak ada lembaran angket yang hilang.
 - 3) Angket yang telah diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam angket, diperiksa kebenarannya sehingga tidak diragukan lagi.
- b. Klasifikasi data, adalah cara untuk mempermudah penelitian untuk mengelompokkan data yang sudah terkumpul sesuai dengan problematika penelitian. Dengan demikian penulis dapat dengan mudah melakukan pengolahan data.
- c. Mengkode data, adalah suatu kegiatan untuk memberikan kode terhadap data yang terkumpul melalui angket, yaitu memberikan nomor secara urut terhadap hasil pilihan responden.
- d. Tabulasi data, bertujuan untuk melihat kecenderungan dari tiap-tiap item. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mentabulasikan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Menyediakan jalur-jalur yang sesuai dengan item yang terdapat dalam angket.
 - 2) Menghitung frekuensi setiap kategori jawaban dari setiap angket yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

1.10. Sistematika Tesis

Guna memudahkan pembahasan penelitian ini, penulis menyusun sistematika tesis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, mengungkapkan fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan PIN di Kota Bandung dan sekaligus menjadikannya sebagai latar belakang penelitian. Untuk memfokuskan masalah penelitian, dijelaskan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, relevansi topik, dan kegunaan penelitian. Fokus masalah ini didukung dengan kajian landasar dasar teori dan asumsi, hipotesis penelitian, definisi operasional variabel, serta metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab II menjelaskan tinjauan teoritis tentang manajemen pendidikan melalui media informasi dalam kaitannya dengan perubahan perilaku ibu. Pembahasan diawali dengan uraian tentang konsep manajemen pendidikan dan dilengkapi dengan manajemen informasi pendidikan, tujuan pendidikan dan perubahan perilaku. Kajian teoritis ini didukung pula dengan hasil terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

Bab III menguraikan tentang hasil penelitian. Pembahasan diawali dengan identitas (profil) responden, manajemen informasi, efektivitas program imunisasi, dan perubahan perilaku ibu.

Bab IV menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang pengaruh manajemen informasi terhadap program imunisasi, pengaruh manajemen informasi terhadap perilaku ibu, serta pengaruh program imunisasi terhadap perubahan perilaku ibu.

Bab V merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi.



